

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Cet. Pertama.

Hasani, I. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Kepustakaan Populer Gramedia.

HAW. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. Medan: Bitra Indonesia

Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Lukman, S. 2021. *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rindawati, I. S., & Sos, S. (2021). *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Media Sains Indonesia.

Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara.

Sutaryono, D.W., & Murtajib, A. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*.

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

B. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Lembaran Negara Nomor

158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587

, Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan di Desa

, Nomor 20 Tahun 2018 Tentang (BUMDes)

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2021 NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Merangin : (14-108/2021)

C. JURNAL

Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1-11.

Almaherani, R. (2021). *Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). *Peranan Badan Usaha (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul*, Yogyakarta 28(2), 155–167.
- Cahyani, E., Guspul, A., Wijayanti, R., Manajemen, P. S., & Ekonomi, F. (2019). *Analisi Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Womnosobo (Studi Empiris Pada BUMDes)*. 1(1), 32–39.
- Donny Michael, *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 132.
- Hasanah Aulia Muthiatul, *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*, *Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hal. 2-3.
- Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013, hlm. 2.
- Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290-303.
- Mokoginta, R. (2015). *ANALISIS HUKUM BISNIS TENTANG KERUGIAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)*. IV(6), 47–56.
- Maulidiah, S., & Si, M. (2016). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa*. II, 143–153.
- Rosalinda Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Malang: Universitas Brawijaya

- Savio Priskus, P. M. (2018). *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)*.
- SARI, P. M. (2012). *Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa*.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40.
- Sumbu, Telly. 2010. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 Oktober.
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96.
- Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". e-jurnal Pemerintah Intregatif.
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>
- Yusnani Hasjimzoem, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* ,Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, hal.464.